

STUDI PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA ALO'O DAN DESA OGOLUGUS KECAMATAN AMPIBABO KABUPATEN PARIGI MOUTONG (STUDI KASUS DESA PEGUNUNGAN DAN DESA PESISIR)

Sudirman

Sudirsos08@yahoo.co.id

(Mahasiswa Program Studi Magister Pembangunan Wilayah Pedesaan Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

This study analyze perceptions of beneficiaries to direct cash assistance program in Alo'o and Ogolugus village in Ampibabo District in Parigi Moutong Regency. In addition, goal of this research is to acknowledge the implementation of fund utilization in direct cash assistance programs that have been distributed to the target households in those village. This methodology apply tabulation of frequency distribution technique. This study found that there are fourthy nine respondents claim that the program has positive impact on them. It means that the program can help the poor income level families. Also, the study found that this program had been implemented based on the government's initiative. However, there are still many poor families have not have the positive impact of this program. In other words, there is an existing invalid data related to poor families so that other poor families could not obtain the benefit of the program.

Keywords: *Utilization, direct cash assistance.*

Kemiskinan merupakan masalah bangsa-bangsa di dunia, khususnya negara yang sedang berkembang. Di sisi lain negara yang maju sekalipun tidak berarti telah bebas dari kemiskinan. Salah satunya adalah negara sedang berkembang seperti Indonesia, pembangunan merupakan satu hal yang mutlak diperlukan. Seperti diketahui, negara Indonesia dalam melakukan pembangunan cenderung mengutamakan kota (*urban bias*) dengan cara investasi industri (Gusti Muhtadin, 1998: 3).

Saat ini bangsa Indonesia dihadapkan dengan populasi penduduk miskin yang masih cukup besar. Berdasarkan data Statistik Indonesia BPS tahun 2013 tercatat penduduk miskin yang berada di perkotaan sebanyak 10,33 juta jiwa atau 8,39 % dari total jumlah penduduk, sedang penduduk miskin yang berada di pedesaan tercatat sebanyak 17,74 juta jiwa atau 14,32 % dari total jumlah penduduk. Sementara itu, sisanya memiliki kondisi yang lebih baik daripada kelompok dalam kategori sangat miskin tersebut, meskipun tentu saja tetap berkategori miskin,

yakni masih belum mempunyai pendapatan yang cukup untuk bebas dari kekurangan. (BPS Indonesia Tahun 2013).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) untuk jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2012. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2011 untuk wilayah kota sebanyak 65,900 jiwa atau 10,05%, sedang jumlah penduduk miskin untuk wilayah desa sebanyak 366,170 jiwa atau 16,04%, sehingga total penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tengah untuk wilayah kota dan desa sebanyak 432,071 jiwa atau 16,04 %. (BPS Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pula, untuk Kabupaten Parigi Moutong posisi relatif tingkat kemiskinannya mencapai 83,400 jiwa atau 20,11 % terhadap Nasional dan Propinsi, berada di atas rata-rata nasional 13,33 % dan di atas rata-rata propinsi 17,24 %. Sedang perkembangan tingkat kemiskinan

Kabupaten Parigi Moutong tahun 2007-2010, cenderung mengalami penurunan pada tahun 2009 dan kembali naik pada tahun 2010 sebesar 0,39 % (BPS Kabupaten Parigi Moutong dalam Angka, 2012).

Kemiskinan dalam hal ini juga memiliki salah satu pokok masalah kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn (2000) yaitu saling ketergantungan, yang artinya bahwa kemiskinan mempengaruhi masalah-masalah kebijakan di bidang lain. Salah satu kebijakan pembangunan seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat yang diantaranya memuat target angka kemiskinan. Target tersebut akan berhasil jika daya beli penduduk terus dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah dari masa pemerintahan Orde Baru hingga saat ini. Namun demikian agaknya upaya pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut masih perlu ditingkatkan lebih keras lagi karena ternyata penduduk miskin baik di desa maupun di kota masih saja besar jumlahnya. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa proyek-proyek penanggulangan kemiskinan belum efektif.

Salah satunya adalah kebijakan pemerintah sebagai upaya untuk membantu rakyat miskin karena dampak kenaikan BBM pada Maret 2005 adalah Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) pada tahun anggaran 2005 yang meliputi: bantuan/subsidi di bidang pendidikan, bidang kesehatan, infrastruktur perdesaan, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin.

Kebijakan ini sebenarnya juga sudah dilakukan pada tahun 2003. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PKPS-BBM tahun 2003 tersebut, *misstargeting* merupakan masalah yang secara umum ditemukan di semua daerah, juga ketidaktepatan dalam hal

pelaksanaan dan besarnya jumlah bantuan yang diterima. Masalah-masalah serupa juga agaknya terjadi pada pelaksanaan PKPS-BBM tahun 2005 ini. Bahkan dampak yang timbul sangat jauh hingga terjadi pembunuhan terhadap aparat, pengrusakan terhadap kantor dan rumah-rumah warga, ancaman-ancaman terhadap aparat desa, dan lain sebagainya.

Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Alo'o dan Desa Ogolugus telah disalurkan pada Oktober Tahun 2005 sampai Oktober 2006 dan dilanjutkan kembali pada Bulan Juni Tahun 2008 sampai Juni 2009, kemudian pada Bulan Juli 2013 melalui kantor pos yang ada di kecamatan, program Bantuan Langsung Tunai hanya bersifat sementara karena adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada waktu tersebut.

Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan data Unit Penetapan Sasaran Penanggulangan Kemiskinan (UPSPK) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Maret 2012, menempati posisi pertama sebagai kabupaten yang memiliki jumlah Individu Sasaran dan Rumah Tangga Sasaran (RTS) terbanyak di Propinsi Sulawesi Tengah, yaitu sebanyak 185.626 jiwa individu sasaran dan sebanyak 40.469 KK Rumah Tangga Sasaran (RTS). (TNP2K, Maret 2012).

Penelitian ini akan mengkaji tentang studi persepsi masyarakat terhadap manfaat Bantuan Langsung Tunai dengan membandingkan implementasi program tersebut pada desa pegunungan dan desa pesisir. Desa Alo'o yang merupakan salah satu dari desa pegunungan yang ada di Kecamatan Ampibabo, memiliki penduduk sejumlah 891 jiwa dengan laki-laki sebanyak 563 jiwa, perempuan sebanyak 328 jiwa dan Rumah Tangga Miskin yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai dari pemerintah. Sebagai perbandingan peneliti mengambil Desa Ogolugus yang merupakan desa pesisir. Desa Ogolugus memiliki penduduk sejumlah 1004 jiwa dengan laki-laki sebanyak 601

jiwa, perempuan sebanyak 403 jiwa dan Rumah Tangga Miskin yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai dari pemerintah.

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat penerima terhadap program Bantuan Langsung Tunai di Desa Alo'o dan Desa Ogolugus di Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong ?
2. Bagaimana pemanfaatan dana program Bantuan Langsung Tunai yang telah terdistribusikan kepada Rumah Tangga Sasaran di Desa Alo'o dan Desa Ogolugus di Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong ?

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menggambarkan dan menganalisis persepsi masyarakat penerima terhadap program Bantuan Langsung Tunai di Desa Alo'o dan Desa Ogolugus di Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong .
2. Menggambarkan, mengidentifikasi dan menganalisis tentang pemanfaatan dana program BLT yang telah terdistribusikan kepada Rumah Tangga Sasaran sebagaimana diharapkan di Desa Alo'o dan Desa Ogolugus di Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Tailor dalam Moleong (1994:3) mengatakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang amat dinikmati. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan masyarakat yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai dari pemerintah ditambah dengan penyebaran kuisisioner yang berada di Desa Alo'o dan

Desa Ogolugus di Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong.

Jumlah populasi yang berada di Kecamatan Ampibabo adalah berjumlah 49 orang yang terdiri dari dua desa yang dijadikan sebagai lokasi penelitian yaitu Desa Alo'o dan Desa Ogolugus. Pemilihan sampel yang di lakukan harus berkaitan dengan apa yang akan diteliti jadi jumlah sampel adalah 49 orang terdiri dari Desa Alo'o dan Desa Ogolugus.

Analisis data

Data yang diperoleh berdasarkan analisis kualitatif dengan memanfaatkan tabel frekuensi dan persentase, kemudian diimplementasikan berdasarkan karakteristik dan kategori sesuai dengan perolehan data di lapangan khususnya data primer, proses analisis data hasil penelitian tersebut akan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. Editing data, yakni mengecek kebenaran hasil observasi, hasil wawancara, kuisisioner dan mentransfer hasil rekaman data tersebut dalam bentuk tulisan.
- b. Kategorisasi data, yakni akan dilakukan pengelompokkan data sesuai dengan rumusan masalah penelitian.
- c. Interpretasi makna data, yakni menafsirkan makna (*meaming*) yang terkandung dalam data dari jawaban para informan dan responden.
- d. Merumuskan beberapa kesimpulan hasil penelitian dari rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis "tabulasi distribusi frekuensi" dari hasil pengelolaan daftar kuisisioner. Dalam menganalisis data dari hasil kuisisioner untuk mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana program Bantuan Langsung Tunai

terhadap persepsi masyarakat, dan apakah program Bantuan Langsung Tunai telah terdistribusikan kepada kelompok Rumah Tangga Sasaran serta program Bantuan Langsung Tunai dapat mengurangi angka kemiskinan dilihat dari keadaan sebelum dan sesudah menerima program dengan menggunakan alat bantuan berupa tabel frekuensi dan persentase, dengan rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Dimana:

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Jumlah Responden

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Persepsi Masyarakat Penerima Terhadap Program Bantuan Langsung Tunai.

Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada zaman modern.

Keluarga miskin adalah bagian dari keluarga atau penduduk Indonesia secara keseluruhan yang semestinya ia harus hidup sebagaimana layaknya manusia Indonesia pada umumnya hanya saja takdir yang berbicara lain, menyebabkan ia harus hidup berbeda dengan masyarakat atau keluarga yang sedikit lebih beruntung, sehingga ia tidak berpredikat keluarga miskin.

Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yakni kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan buatan terjadi karena lembaga-lembaga yang

ada dimasyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, hingga mereka tetap miskin.

Berbagai persoalan kemiskinan penduduk memang menarik untuk disimak dari berbagai aspek, sosial, ekonomi, psikologi dan politik. Aspek sosial terutama akibat terbatasnya interaksi sosial dan penguasaan informasi. Aspek ekonomi akan tampak pada terbatasnya pemilikan alat produksi, upah kecil, daya tawar rendah, tabungan nihil, lemah mengantisipasi peluang. Dari aspek psikologi terutama akibat rasa rendah diri, fatalisme, malas, dan rasa terisolir. Sedangkan dari aspek politik berkaitan dengan kecilnya akses terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan diskriminatif, posisi lemah dalam proses pengambil keputusan.

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian. Kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan dan pendidikan.

Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup diatas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedangkan miskin yang bersifat kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Kemiskinan itu oleh sebagian orang dianggap sebuah takdir yang tidak bisa dirubah dan sudah menjadi ketentuan yang digariskan oleh sang maha pencipta setiap manusia selalu berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari kemiskinan, untuk takdir dari penyakit sosial yang memalukan tersebut, akan tetapi usaha yang dilakukan ternyata tidak mampu merubah hidupnya, tidak

mampu mengagngkat derajatnya, dan itulah yang namanya takdir. Dan karena itu maka kemiskinan dimasyarakat, kemiskinan

dikeluarga tetap saja ada sebagaimana yang penulis temukan di Desa Alo'o dan Desa Ogolugus sebagai lokasi penelitian penulis.

Tabel 1.
Pandangan Responden Terhadap Bantuan Langsung Tunai
Desa Alo'o dan Desa Ogolugus

No	Jawaban Responden	Desa Alo'o		Desa Ogolugus	
		f	%	f	%
1	Sangat Membantu	17	48	6	42
2	Cukup Membantu	11	31	4	28
3	Tidak Membantu Sama Sekali	7	20	4	28
	Jumlah	35	100	14	100

Sumber: Hasil Penelitian diolah, 2014.

Ternyata jawaban responden mengenai pandangannya terhadap program Bantuan Langsung Tunai untuk Desa Alo'o cukup beragam. Ada yang mengatakan sangat membantu, cukup membantu bahkan ada juga yang mengatakan tidak membantu sama sekali.

Dari sejumlah 35 responden yang dibagikan kuesioner dan penulis wawancara mengatakan bahwa program Bantuan Langsung Tunai dari pemerintah memiliki jawaban yang cukup beragam. Keterangan tersebut diperoleh dari sejumlah 17 responden (48%). Responden ini mengaku bahwa kata jika tidak ada bantuan dari pemerintah, maka semakin sulit kehidupan yang mereka rasakan walaupun bantuan tersebut hanya bersifat sementara.

Sementara itu sebanyak 11 responden (31%) yang mengatakan cukup membantu. Kemudian sebanyak 7 responden (20%) yang mengatakan bahwa Bantuan Langsung Tunai tersebut sebetulnya tidak membantu sama sekali Cuman membuat masyarakat tambah malas karena bantuan ini hanya bersifat sementara, seharusnya yang diberikan kepada mereka bantuan modal yang cukup untuk mereka berusaha.

Sedangkan untuk Desa Ogolugus berdasarkan dari tabel frekuensi di atas ternyata jawaban responden mengenai pandangannya terhadap program Bantuan

Langsung Tunai cukup beragam. Ada yang mengatakan sangat membantu sebesar 6 (42%), cukup membantu sebesar 4 (28%) bahkan ada juga yang mengatakan tidak membantu sama sekali sebesar 4 (28%).

Dari keterangan responden yang sudah ditampilkan malalui analisis dalam sub pokok bahasan ini, dapat dikatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai untuk masyarakat khususnya keluarga miskin sangat membantu. Artinya bagaimanapun sedikitnya jumlah bantuan tersebut tetapi tetap membawa manfaat dalam menyambung kehidupan masyarakat. Hal ini tergambar dari pengakuan mayoritas responden bahwa kehadiran bantuan langsung tunai untuk keluarga miskin sangat membantu walaupun sifatnya hanya sementara.

Pelaksanaan Pemanfaatan Dana yang Telah terdistribusikan Kepada Rumah Tangga Sasaran

Pelaksanaan pendistribusian program Bantuan Langsung Tunai untuk keluarga miskin diwilayah Indonesia termasuk Desa Alo'o dan Desa Ogolugus sendiri hingga saat ini telah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang menerimanya. Hanya saja disela pendistribusian Bantuan Langsung Tunai tersebut masih sering diperhadapkan

oleh persoalan baru. Khususnya ketika diadakan pembagian dilapangan.

Saat ini masih sering ditemukan pembagian Bantuan Langsung Tunai yang tidak tepat sasaran. Artinya keluarga yang semestinya tidak boleh diberikan Bantuan Langsung Tunai, tetapi tetap mendapat bantuan tersebut. Sementara ada yang justru harus memperoleh Bantuan Langsung Tunai tetapi tidak kebagian. Di Desa Alo'o dan

Desa Ogolugus sejak masuknya Bantuan Langsung Tunai disatu sisi diakui membantu masyarakat miskin untuk kebutuhan mereka walaupun pembagiannya bertahap.

Hubungan itu maka penulis menanyakan kepada responden mengenai pendistribusian Bantuan Langsung Tunai untuk keluarga miskin di Desa Alo'o dan Desa Ogolugus. Jawabannya tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 2.

Jawaban Responden Tentang Ketepatan Pendistribusian Bantuan Langsung Tunai Desa Alo'o dan Desa Ogolugus

No	Jawaban Responden	Desa Alo'o		Desa Ogolugus	
		f	%	f	%
1	Sudah Tepat Sasaran	25	71	9	64
2	Tidak Tepat Sasaran	10	28	5	35
	Jumlah	35	100	14	100

Sumber: Hasil Penelitian diolah, 2014.

Pada umumnya responden mengaku bahwa pendistribusian Bantuan Langsung Tunai untuk keluarga miskin. Khususnya Desa Alo'o dianggap sudah tepat sasaran. Data dan keterangan tersebut diperoleh dari sejumlah 25 responden (71%). Ketepatan sasaran yang responden maksudkan adalah bahwa yang menerima bantuan langsung tunai tersebut adalah benar-benar dari keluarga yang tidak mampu, keluarga miskin, yang tidak memiliki pendapatan yang lebih sehingga mereka memang perlu mendapatkan bantuan.

Sementara itu 10 responden (28%) yang menyatakan bahwa jika dilihat dari ketepatan penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Alo'o sebetulnya sebagian kecil tidak tepat sasaran.

Sedangkan untuk Desa Ogolugus berdasarkan dari tabel frekuensi di atas pada umumnya responden mengaku bahwa pendistribusian Bantuan Langsung Tunai untuk keluarga miskin. Khususnya Desa Ogolugus dianggap sudah tepat sasaran. Data

dan keterangan tersebut diperoleh dari sejumlah 9 responden (64%). Ketepatan sasaran yang responden maksudkan adalah bahwa yang menerima bantuan langsung tunai tersebut adalah benar-benar dari keluarga yang tidak mampu, keluarga miskin, yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga mereka memang perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Sedangkan 5 responden (28%) menjawab bahwa jika dilihat dari ketepatan penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Ogolugus sebetulnya sebagian kecil tidak tepat sasaran.

Untuk itu distribusi atau pembagian bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin kebanyakan dilakukan di kantor pos terdekat, untuk Desa Alo'o dan Desa Ogolugus sendiri disalurkan melalui kantor pos di Kecamatan Ampibabo. Dengan demikian, harga BBM, dimana setiap keluarga miskin akan menerima sebesar Rp. 100.000 perbulan selama setahun yang dibayarkan pertiga bulan sekali.

Tabel 3.
Pendapat Responden Terhadap Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Desa Alo'o dan Desa Ogolugus

NO	Pendapat Responden	Desa Alo'o		Desa Ogolugus	
		f	%	f	%
1	Sudah Berjalan Sesuai Dengan Ketentuan	16	45	10	71
2	Tidak Sesuai Dengan Ketentuan	14	40	4	28
3	Tidak Tahu	5	14	0	0
	Jumlah	35	100	14	100

Sumber: Hasil Penelitian diolah, 2014.

Data dalam bentuk keterangan yang diberikan oleh responden sejumlah 16 (45%) sebagaimana yang tertera dalam tabel diatas menjelaskan bahwa pada umumnya responden mengetahui bahwa pelaksanaan program pemerintah dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai untuk keluarga miskin di Desa Alo'o sudah berjalan dengan sesuai ketentuan dan aturan.

Namun ternyata ada 14 (40%) responden mengatakan kepada penulis sebetulnya pelaksanaan program bantuan langsung tunai di Desa Alo'o tidak berjalan sesuai dengan ketentuan. Dimana sukses tidaknya kebijakan program bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin di Desa Alo'o sangat ditentukan dengan adanya kerja sama dengan masyarakat, dana bantuan langsung tunai dari pemerintah kemasyarakatan miskin yang pengendalian dan pengelolaannya dipercayakan pemerintah desa bersama lembaga-lembaga yang telah ditentukan dan dana ini diperuntukkan untuk keluarga miskin.

Sedangkan untuk Desa Ogolugus berdasarkan dari tabel di atas menjelaskan bahwa pada umumnya responden mengetahui bahwa pelaksanaan program pemerintah dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai untuk keluarga sudah berjalan dengan sesuai ketentuan dan aturan sebesar 10 (71%).

Sementara dari 4 (28%) responden mengatakan bahwa pelaksanaan program

bantuan langsung tunai di Desa Ogolugus belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimana sukses tidaknya kebijakan bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin di Desa Ogolugus sangat ditentukan dengan adanya kerja sama dengan masyarakat, dana bantuan langsung tunai dari pemerintah kemasyarakatan miskin yang pengendaliannya dan pengelolaannya dipercayakan pemerintah desa bersama lembaga-lembaga yang telah ditentukan dan dana ini diperuntukkan untuk keluarga miskin. Selanjutnya ada 0 (0%) responden yang tidak memberikan jawaban.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Hasil kajian terhadap Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat Bantuan Langsung Tunai di Desa Alo'o dan Desa Ogolugus Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada umumnya responden (keluarga miskin) penerima program Bantuan Langsung Tunai di Desa Alo'o dan Desa Ogolugus memandang bahwa kebijakan pemerintah dalam bentuk program Bantuan Langsung Tunai untuk keluarga miskin cukup membantu masyarakat atau keluarga miskin didalam memenuhi kebutuhan hidup mereka walaupun tidak semua terpenuhi dalam kehidupan mereka. Pada

umumnya responden mengakui bahwa meskipun kebijakan program Bantuan Langsung Tunai hanya bersifat sementara.

2. Program Bantuan Langsung Tunai untuk keluarga miskin, sekalipun telah diupayakan untuk melibatkan berbagai instansi, bahkan sampai pada tingkat pemerintah dari Kecamatan sampai Desa, namun tetap diperhadapkan kepada kendala ketidaksesuaian data keluarga miskin yang diperoleh pemerintah yang berada dipedesaan.

Rekomendasi

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti selama beberapa bulan di lapangan. Terdapat beberapa hal yang akan menjadi saran berkenaan pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di dua daerah yang diteliti.

1. Disarankan kepada para pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah agar dapat merumuskan sebuah program penanggulangan kemiskinan yang lebih baik, yang sesuai dengan prioritas kebutuhan keluarga miskin dan program tersebut harus mampu memberikan rangsangan yang positif kepada keluarga agar mereka mau berusaha memperbaiki kondisi kehidupannya. Sehingga program ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan serta memberikan manfaat yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin.
2. Ukuran untuk menentukan dan menetapkan sebuah keluarga miskin juga harus jelas, apa ukuran dan indikatornya, petugas yang berhak menangani harus menelusuri keluarga miskin yang bersangkutan.
3. Disarankan kepada pihak yang mendata penduduk miskin serta pihak-pihak yang

terkait dalam program bantuan dari pemerintah untuk lebih giat membenahi kinerjanya agar pembagian dana Bantuan Langsung Tunai ini dapat merata dan tepat sasaran agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Eko Jokolelono, S.E.,M.Si selaku ketua Tim Pembimbing dan kepada Dr. Roslinawati, M.Si. selaku Anggota Tim Pembimbing.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, S. 1997. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia
- Badan Pusat Statistik Indonesia
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Parigi Moutong.
- Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Tengah.
- Cholil Narbuko, H. Abu Ahmadi. 1991. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dunn, William, N. 1981. *Public Policy Analysis*. New jersey, Englewood Chief: Prentice Hall.
- Kemiskinan bertambah (2009, 13 Februari). *Kompas*, 1 & 5.
- Moleong, L. 1988. *Motodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Pedoman Umum Pra Pelaksanaan Pendistribusian Kartu Kompensasi BBM (KKB) Tahun 2005
- Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak, 2003